

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Reformasi Birokrasi Melalui Absensi QR Code Pada Pemerintah Kota Dumai

Rahmi Hayati*, Mesi Yendara, Rica Insira, Nabila Wajihah, Erinaldi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung reformasi administrasi melalui pelaksanaannya. absensi berbasis kode QR di Pemerintah Kota Dumai. Melalui analisis literatur, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa implementasi kode QR dapat meningkatkan disiplin pegawai, akurasi data, dan efisiensi administrasi. Implementasi Ini sekaligus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, indeks SPBE Kota Dumai hingga kategori tertentu merupakan indikasi yang sangat baik dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan elektronik secara berkelanjutan. Implementasi SPBE melalui penggunaan kode QR berkontribusi pada reformasi administrasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah.

Kata kunci: SPBE, Reformasi Birokrasi, Absensi QR Code, *Good Governance*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.437>

*Correspondence: Rahmi Hayati

Email: rahmihayati679@gmail.com

Received: 06-03-2026

Accepted: 06-04-2026

Published: 06-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) in the reform of birokrasi through the implementation of QR code-based absences in the Pemerintah Kota Dumai. Through literary analysis, the study employs a deskriptif method with a kualitatif approach. The study's findings indicate that the implementation of QR codes can improve employee discipline, data accuracy, and administrative efficiency. This implementation also strengthens the principles of good governance, particularly transparency and accountability. Aside from that, the increase in the SPBE Kota Dumai index up to the category is a very good indication of the government's commitment to developing the electronic government's tata kelola in a continuous manner. The implementation of SPBE through the use of QR codes contributes to more effective and efficient birokrasi reform for the government.

Keywords: SPBE, Bureaucratic Reform, QR Code Attendance, *Good Governance*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju sistem digital. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem informasi yang baik juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Organisasi pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola data dan sumber daya manusia, termasuk dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja (Rahmawati et al., 2025).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu strategi utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan TIK (Komarudin et al., 2025). Penerapan SPBE juga sejalan dengan pengembangan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hidayah et al., 2022).

Pembangunan birokrasi yang profesional juga didukung oleh penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem merit menekankan pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan objektif (Anas, Fahmi, Shodikin, 2025). Upaya ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, serta kinerja aparatur pemerintah. Reformasi birokrasi juga mencakup perubahan pada sistem kerja dan budaya organisasi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas (Wirawan et al., 2025).

Masih terdapat kesenjangan antara konsep dan implementasi SPBE di tingkat daerah. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek regulasi, konsep e-government, dan sistem merit secara umum. Kajian yang menghubungkan implementasi SPBE dengan aspek kedisiplinan pegawai serta pengelolaan sumber daya manusia masih terbatas. Padahal, keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan perilaku aparatur sebagai pengguna sistem. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat hubungan antara penerapan sistem digital dengan peningkatan disiplin dan kinerja ASN (Rahmawati et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPBE dalam mendukung reformasi birokrasi dengan fokus pada aspek kedisiplinan dan pengelolaan ASN. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian administrasi publik dengan

mengintegrasikan perspektif teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPBE. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan di masa depan (Ilham et al., 2020).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama penelitian. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, dan implementasi absensi berbasis kode QR di Pemerintah Kota Dumai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Tahapan penelitian meliputi proses pembacaan secara mendalam, pengelompokan informasi, serta perangkuman data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan dipadukan dengan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi makna, konsep, dan informasi penting dalam setiap dokumen, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu yang berkaitan dengan implementasi SPBE dan absensi berbasis QR code. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori dan konsep yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Tata kelola yang baik adalah konsep yang menggambarkan bagaimana pemerintah mengelola urusan publik dan operasional sehari-hari secara efektif, transparan, dan jujur. Tata kelola yang baik dapat dilihat tidak hanya dari cara pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Konsep ini mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan pengendalian korupsi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang dapat

memberikan pelayanan publik secara efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat umum.

Pemerintah Indonesia mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti berbagi informasi, akuntabilitas di tempat kerja, jawab tanggung jawab, dan kebijakan publik. Transparansi difasilitasi oleh upaya pemerintah untuk menyampaikan informasi secara imparial dan tanpa diskriminasi. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mematuhi semua kebijakan dan penggunaan anggaran Pemerintah juga diharuskan untuk memberikan pelayanan secara adil tanpa memisahkan satu komunitas dengan komunitas lainnya (Sukawati et al., 2022).

Penerapan good governance berkaitan dengan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi. Sistem pemerintahan yang efektif harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa membedakan latar belakang pengguna layanan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menilai tata kelola pemerintahan yang baik antara lain akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, serta efektivitas dan efisiensi (Nurhidayat, 2023).

Penerapan good governance menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Komitmen, integritas, dan profesionalitas aparatur diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Harjianto, 2024).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik serta efektivitas kinerja birokrasi. Penerapan SPBE dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemerintahan yang transparan serta tuntutan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik melalui integrasi sistem, serta diharapkan mampu mengurangi kerumitan birokrasi dan menekan penyimpangan dalam pelayanan publik.

Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, termasuk efektivitas, efisiensi, interoperabilitas, keterpaduan, kesinambungan, akuntabilitas, dan keamanan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan dapat beroperasi secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Integrasi dalam SPBE sangat penting untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan lancar antar lembaga (Rusdy, R.M. Iman Rifai, 2023).

SPBE mendorong berbagai bentuk koneksi antara pemerintah dan berbagai entitas, seperti pemerintah dan masyarakat umum, komunitas bisnis, lembaga pemerintah, pegawai, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan dari koneksi ini adalah untuk meningkatkan akses informasi, meningkatkan koordinasi, dan mendorong pelayanan yang lebih transparan dan responsif (Choirunnisa et al., 2023).

Penerapan SPBE di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan birokrasi yang modern dan berbasis digital. SPBE tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, penerapan SPBE masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sistem integrasi dan kesiapan sumber daya (Kencono et al., 2024).

Layanan SPBE atau e-government dapat dibagi menjadi delapan jenis (Arief Assaf, 2021) yaitu:

1. **Government to Citizen (G2C)**

Layanan ini merupakan pelayanan publik berbasis online yang memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi serta berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

2. **Citizen to Government (C2G)**

Layanan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi, aspirasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah melalui media elektronik.

3. **Government to Business (G2B)**

Jenis layanan ini berkaitan dengan interaksi pemerintah dengan sektor bisnis, seperti pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dan pengembangan pasar digital untuk kebutuhan pemerintah.

4. **Business to Government (B2G)**

Layanan ini memungkinkan pihak swasta atau pelaku bisnis menyediakan barang dan jasa kepada pemerintah melalui sistem elektronik, termasuk dalam proses tender dan transaksi digital.

5. **Government to Employee (G2E)**

Layanan ini ditujukan bagi pegawai pemerintah, seperti pengelolaan administrasi kepegawaian, komunikasi internal, hingga penggunaan sistem *e-office* untuk mengurangi penggunaan kertas.

6. **Government to Government (G2G)**

Layanan ini mendukung komunikasi dan kerja sama antarinstansi pemerintah secara online guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

7. Government to Non-Profit (G2N)

Pemerintah menyediakan informasi dan layanan kepada organisasi non-profit, seperti partai politik, organisasi sosial, dan lembaga kemasyarakatan.

8. Non-Profit to Government (N2G)

Layanan ini memungkinkan organisasi non-profit menyampaikan informasi serta berkomunikasi dengan pemerintah secara elektronik.

Faktor Penyebab Implementasi SPBE dan Absensi QR Code

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan absensi berbasis QR Code di Pemerintah Kota Dumai tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong yang bersifat struktural maupun teknologis. Salah satu faktor utama adalah tuntutan penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari praktik maladministrasi Digitalisasi melalui SPBE menjadi solusi strategis untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta pengawasan kinerja aparatur (Wardana et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi faktor penting yang mendorong transformasi sistem pemerintahan dari manual menuju digital. Kemajuan teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan secara elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat (Choirunnisa et al., 2023) yang menyatakan bahwa SPBE berperan dalam meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Tantangan Implementasi SPBE dan Absensi QR Code

Meskipun implementasi SPBE di Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang signifikan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi sistem antar perangkat daerah. Masih terdapat aplikasi atau sistem yang berjalan secara parsial sehingga menghambat terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi. (Kencono et al., 2024) menyebutkan bahwa permasalahan integrasi sistem merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi SPBE di berbagai daerah di Indonesia.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan yang cukup krusial. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan dan literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem berbasis elektronik. Hal ini menyebabkan pemanfaatan sistem yang telah dibangun menjadi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya

berkelanjutan berupa pelatihan dan sosialisasi agar ASN mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi (Rahmadi, Muhamad Hanan, 2025)

Tantangan berikutnya adalah koordinasi antar instansi pemerintah. Implementasi SPBE membutuhkan sinergi yang kuat antar organisasi perangkat daerah (OPD), baik dalam hal pertukaran data maupun integrasi layanan. Namun, dalam praktiknya koordinasi ini seringkali belum berjalan secara efektif karena perbedaan sistem, kebijakan, maupun tingkat kesiapan masing-masing instansi (Hapsari & Permana, 2025).

Kekurangan Implementasi SPBE dan Absensi QR Code

Di samping berbagai capaian yang telah diraih, implementasi SPBE dan absensi QR Code di Kota Dumai juga masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan sistem secara menyeluruh. Meskipun infrastruktur dan aplikasi telah tersedia, tidak semua instansi atau pegawai memanfaatkan sistem tersebut secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan tingkat penggunaannya.

Kekurangan lainnya adalah ketidakseimbangan antara pengembangan teknologi dan kesiapan SDM. Transformasi digital yang dilakukan cenderung lebih fokus pada pembangunan sistem, sementara aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya sejalan. Akibatnya, implementasi sistem tidak berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan resistensi dari pengguna (Anggraini & Oktadinna, 2025).

Selain itu, implementasi SPBE masih cenderung berorientasi pada sistem, bukan pada kualitas pelayanan. Artinya, keberhasilan sering diukur dari keberadaan aplikasi atau teknologi yang digunakan, bukan dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Padahal, tujuan utama SPBE adalah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. (Rusdy, R.M. Iman Rifai, 2023)

Implementasi Absensi QR Code di Pemerintah Kota Dumai

Absensi pegawai merupakan salah satu indikator terpenting dalam menentukan tingkat kedisiplinan dan produktivitas ASN. Sistem absensi tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan kehadiran, tetapi juga sebagai sumber data dalam penilaian kinerja serta pengembangan strategi manajemen. Absensi pengelolaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas pegawai (Ferdika, Rengga & Nasution, 2020).

Pemerintah Kota Dumai melakukan inovasi dalam sistem absensi dengan menerapkan absensi elektronik berbasis QR Code. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan disiplin dan kinerja ASN

melalui pemanfaatan teknologi digital. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital menunjukkan adanya langkah konkret dalam mendukung transformasi birokrasi yang lebih modern (Diana, 2021).

Penerapan e-Absensi QR Code juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang mengaitkan kehadiran pegawai dengan pemberian tambahan penghasilan. Hal ini mendorong pegawai untuk lebih disiplin dalam hal kehadiran dan ketepatan waktu. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kesiapan pegawai dalam menggunakan sistem baru tersebut (Gultom, 2022).

Penggunaan absensi QR Code memberikan kemudahan dalam proses pencatatan kehadiran karena dilakukan secara digital dan lebih praktis. Sistem ini memungkinkan data kehadiran tersimpan secara otomatis sehingga dapat meningkatkan akurasi dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi karena data kehadiran dapat dipantau secara lebih terbuka (Aksayeth et al., 2025).

Program absensi berbasis QR Code Pemerintah Kota Dumai menyoroti perlunya upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi kepegawaian. Sistem ini tidak hanya berperan sebagai pencatat kehadiran, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong produktivitas, kedisiplinan, dan akuntabilitas kinerja ASN (Harahap et al., 2025).

Perkembangan dan Capaian SPBE di Pemerintah Kota Dumai

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Pemerintahan Kota Dumai menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pertumbuhan berkelanjutan dan prediksi yang sukses pada indeks SPBE. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintahan Kota Dumai mampu mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan peringkat tertinggi di Riau dalam evaluasi SPBE.

Peningkatan tersebut tercermin dari nilai indeks SPBE yang mengalami tren positif, mulai dari tahun 2022 sebesar 2,63, meningkat pada tahun 2023 menjadi 3,43, kemudian tahun 2024 mencapai 3,90, hingga pada tahun 2025 meningkat menjadi 4,02 dengan predikat sangat baik. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan (Tasya, 2026).

Hasil yang disebutkan di atas tidak menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan integrasi sistem dan meningkatkan kualitas layanan digital. Penguatan arsitektur SPBE terintegrasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan nilai evaluasi, sehingga dapat mengurangi sistem yang beroperasi secara terpisah antar perangkat daerah (Sari, 2023).

Berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan kemajuan teknologi dalam layanan digital, seperti pengembangan situs web pemerintah, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas manusia untuk mendukung implementasi SPBE. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa sistem yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal (Dimar, 2025).

Capaian SPBE yang diraih Pemerintah Kota Dumai mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan SPBE dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi.

Hal ini juga menunjukkan bahwa implementasi berbagai inovasi digital seperti sistem absensi berbasis Kode QR merupakan bagian dari upaya yang lebih komprehensif untuk mendukung transformasi digital pemerintah. Akibatnya, implementasi SPBE di Kota Dumai tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Simpulan

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya melalui absensi berbasis QR Code di Pemerintah Kota Dumai, menunjukkan implikasi strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja aparatur, sekaligus memperkuat arah reformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan terdigitalisasi. Meskipun demikian, optimalisasi implementasi tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi sistem, peningkatan kompetensi digital sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis teknologi agar pemanfaatan data dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, secara praktis pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan integrasi SPBE dengan sistem kinerja dan penggajian, memperkuat infrastruktur serta keamanan informasi, dan menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi ASN. Sementara itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara lebih komprehensif efektivitas SPBE terhadap kinerja individu ASN dan kualitas pelayanan publik, serta melakukan studi komparatif antar daerah guna menghasilkan model implementasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Referensi

Aksayeth, M. B. Wasis, F. (2025). *Sistem Informasi Absensi Karyawan Berbasis Mobile dengan Fitur Geolocation dan Pengelolaan Data Pegawai Berbasis Website Abstrak*. 5(2), 97–106.

- Anas, Fahmi, Shodikin, A. S. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Merit Sistem Pemerintahan Daerah (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Lamongan)*. 17(1).
- Anggraini, J., & Oktadinna, N. K. (2025). *Economics (JBFE) Transformasi Sumber Daya Manusia dalam Era Industri 5 . 0 : Tantangan dan Peluang Pengembangan Karyawan*.
- Arief, Assaf, M. Y. A. (2021). *Kajian Literatur (Systematic Literature Review) : Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. 8(1), 1–6.
- Choirunnisa, L. Rohmah, E. I. (2023). *PERAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA UIN Sunan Ampel Surabaya Pendahuluan Dalam era digital yang semakin berkembang pesat , pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk menin*. 3.
- Diana. (2021). *Absensi di Pemko Dumai Pakai QR Code*. <https://riaupos.jawapos.com/dumai/2108200019/->
- Dimar, I. C. (2025). *(SPBE) TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Skripsi) Oleh : INEZ CAHYA DIMAR PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BA*.
- Ferdika, Rengga, R. D. N., & Nasution, R. D. (2020). *PENERAPAN E-ABSENSI DI KABUPATEN PONOROGO CHANGES IN ORIENTATION OF EMPLOYEE MOTIVATION IN THE APPLICATION OF E-ABSENSI IN PONOROGO DISTRICT*.
- Gultom, F. A. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI ONLINE DALAM SKRIPSI Oleh : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*.
- Hapsari, A., & Permana, I. (2025). *The Implementation of Data Interoperability Services in the Government of West Sumatra Province. The Future of Education Journal, 4(7), Page*. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Harahap, A. A. Saptari, M. A. (2025). *Sistem Informasi Absensi Magang Berbasis Website Menggunakan Qr Code pada Bagian SDM dan Sistem Manajemen PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Medan*. 9(2), 48–63.
- Harjianto, A. R. S. (2024). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH*

PEMERINTAHAN DESA BULUAGUNG SILIRAGUNG BANYUWANGI DALAM PELAYANAN PUBLIK. 16(2), 43–52.

Hidayah, E. S. Sulawesi, P. (2022). *Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. 4(2), 49–67.

Ilham, A. R. Gusti, R. (2020). *SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE : REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) AS A PILLAR OF GOOD GOVERNANCE : A REFLECTION ON LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT*.

Kencono, B. D. Handoko, T. W. (2024). *Transformasi Pemerintahan Digital : Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia*. 7, 1498–1506.

Komarudin, D. Setiawan, S. (2025). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Instrumen Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketahanan Pangan Berkelanjutan*. 8(2), 575–583.

Nurhidayat, I. (2023). *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*. 1, 40–52.

Rahmadi, Muhamad Hanan, E. T. R. (2025). *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Transformasi Digital Manajemen SDM di Instansi Pemerintah : Adaptasi .. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 113–121.

Rahmawati, Siti Indah, Eka Putri Rahayu, Murni, E. (2025). *IMPLEMENTASI APLIKASI PRESENSI SIMPEGNAS SEBAGAI PENGGANTI E-*. 2, 401–423.

Rusdy, R.M. Iman Rifai, S. F. (2023). *PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. 95, 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>

Sari, N. D. (2023). *KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH*. 1–14.

Sukawati, I. K. Mahasaraswati, U. (2022). *Jurnal Discretie : Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance berbasis Partisipasi Masyarakat Jurnal Discretie* : 3(3), 170–181.

- Tasya. (2025). *Indeks SPBE Kota Dumai 2025 Capai 4,02*. https://rri.co.id/pekanbaru/info-pemda/2091632/indeks-spbe-kota-dumai-2025-capai-4-02#google_vignette
- Wardana, R. Online, A. (2025). *Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik*. 7(1), 66–80.
- Wirawan, D. G. Tjenreng, Z. (2025). *Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia*. 5(1), 179–193.